

**ANALISIS DETERMINAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH  
KOTA SUNGAI PENUH**

**Khairil Anwar**

**Fungsional Perencana Ahli Muda Pemerintah Kota Sungai Penuh**

Email Korespondensi: irekbagong@gmail.com

**ABSTRACT**

This research aims to analyze the qualitative characteristics of local government financial statement (relevant, reliable, understandable and comparable) and the effect of human resource competency, control environment, the role of the government's internal audit apparatus and quality of review toward the quality of local government financial statement. The research conducted on 30 working unit area device in Sungai Penuh. This research used quantitative descriptive method. The primary data collected through questioner and interview. The statistic method used to test the hypotheses was multiple linier regression using SPSS version 22. Results of analysis showed that the achievement of unqualified opinion describes financial statement that have good quality. The financial statement of 2011 and 2013 indicate a weakness in terms of reliability. Test results showed that human resource competency, control environment, the role of the government's internal control apparatus and quality of review together have a significant effect on the quality of local government financial statement. Partially the quality of review has insignificant effect on the quality of local government financial statement.

**Keywords:** Financial statement, Local government, Quality.

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah (relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan), dan pengaruh kompetensi sumber daya manusia, lingkungan pengendalian, peran aparat pengawasan intern pemerintah dan kualitas revidu terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian dilakukan pada 30 satuan kerja perangkat daerah di Kota Sungai Penuh. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS versi 22. Hasil analisis menunjukkan bahwa pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian menggambarkan laporan keuangan memiliki kualitas yang baik. Laporan keuangan tahun 2011 dan 2013 menunjukkan adanya kelemahan dalam hal keandalan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, lingkungan pengendalian, peran aparat pengawasan intern pemerintah dan kualitas revidu secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Secara parsial kualitas revidu tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

**Kata kunci:** Laporan keuangan, Pemerintah daerah, Kualitas.

**PENDAHULUAN**

Undang-Undang Keuangan Negara mewajibkan pemerintah menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas berupa keterbukaan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya publik (Mardiasmo, 2006). Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi

*Penerbit:*

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**  
[redaksi@governance@gmail.com](mailto:redaksi@governance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

177

Indexed:



efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang undangan.

Pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah menghasilkan pendapat/opini. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa tentang kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern. Jonas dan Blanchett (2000) dalam Indriasih (2014) menyebutkan, kualitas pelaporan keuangan adalah informasi yang lengkap dan transparan, yang dirancang agar tidak menyesatkan kepada pengguna. menyatakan dimensi kualitas informasi, terdiri dari relevan, ketepatan waktu, akurasi, kelengkapan dan meringkas. Karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan meliputi relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami (PP No.71/2010).

Basri (2014) menyatakan, meningkatnya kualitas laporan keuangan ditandai dengan semakin membaiknya opini audit yang diberikan oleh BPK (<http://www.bppk.kemenkeu.go.id>). LKPD yang berkualitas belum tentu memperoleh opini WTP dan LKPD yang mendapatkan opini WTP mestinya menunjukkan laporan keuangan yang berkualitas. Hal tersebut dikarenakan perbedaan kriteria yang mendasari rewiu LKPD oleh APIP dan audit LKPD oleh BPK, yaitu kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*); dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Secara konseptual terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Bauwhede (2001) menyebutkan, faktor potensial yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah keputusan manajemen, kualitas mekanisme tata kelola eksternal (kualitas audit), kualitas mekanisme tata kelola internal (kualitas dewan direksi), regulasi pelaporan keuangan dan mekanisme tata kelola eksternal dan internal. Rezaee (2003) menyatakan, faktor yang menentukan kualitas pelaporan keuangan, yaitu: direksi, auditor internal, komite audit, auditor eksternal, top management dan governing bodies. Xu et. al dalam Choirunisah (2008) menyatakan, komponen pokok yang berdampak terhadap kualitas informasi akuntansi meliputi human, system, organisational and external issues.

Hasil pemeriksaan BPK terhadap 533 LKPD tahun 2015 menemukan, permasalahan sistem akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja serta kelemahan struktur pengendalian intern. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung dengan sumber daya manusia yang memadai, pejabat/ pegawai yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, satuan pengawas intern tidak optimal menjalankan tugas dan fungsinya serta kurangnya koordinasi antar pejabat/pegawai yang terkait (BPK, IHPS I/2016).

Opini WTP laporan keuangan Pemerintah Kota Sungai Penuh mestinya menggambarkan laporan keuangan yang andal, relevan, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Proses penyusunan laporan keuangan masih adanya pendampingan (*consulting activities*) dari BPKP (Rosidi, Wawancara, 27 Februari 2017), pengendalian dan penatausahaan persediaan tidak sesuai ketentuan pengelolaan barang milik daerah (BPK, 2015). APIP Kota Sungai Penuh masih berada di level initial, belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan mencegah korupsi (Suhatri, Wawancara, 13 April 2017) dan rewiu LKPD hingga tahun 2016 tidak dilakukan secara periodik sepanjang pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan.

Teori yang mendasari penelitian ini adalah Agency Theory. Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan, hubungan keagenan sebagai suatu kontrak kerja sama (*nexus of contract*) satu atau lebih prinsipal menggunakan orang lain atau agen untuk menjalankan aktivitas perusahaan, prinsipal adalah pemegang saham/pemilik/investor. Hubungan tersebut memunculkan kecenderungan perbedaan kepentingan, karena pada prinsipnya manusia akan berusaha memaksimalkan utilitas bagi kepentingan dirinya sendiri. Perbedaan ini membawa potensi terjadinya konflik antara prinsipal dengan agen. Penelitian Indriasih (2014), Afiah dan Rahmatika (2014) menemukan, kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Choirunisah (2008), Indriasih (2014) dan Sudiarianti (2014) mengungkapkan, sistem pengendalian intern pemerintah merupakan

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**  
[redaksi@governance@gmail.com](mailto:redaksi@governance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

178

Indexed:



faktor yang mempengaruhi kualitas LKPD. Setyowati (2016) menemukan, peran internal audit berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah. Gau (2016) menyatakan, revidi laporan keuangan yang berkualitas dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Mengacu pada hasil pemeriksaan BPK, fenomena yang terjadi pada Pemerintah Kota Sungai Penuh dan faktor-faktor yang secara konseptual mempengaruhi kualitas laporan keuangan serta berbagai penelitian sebelumnya yang relevan, maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis karakteristik kualitatif laporan keuangan Pemerintah Kota Sungai Penuh dan menganalisis pengaruh kompetensi SDM, lingkungan pengendalian, peran APIP dan kualitas revidi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Hipotesis: diduga kompetensi sumber daya manusia, lingkungan pengendalian, peran aparat pengawasan intern pemerintah dan kualitas revidi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## METODE

Jenis data yang digunakan data primer dan sekunder. Data primer merupakan data hasil wawancara dan survei yang diperoleh peneliti langsung dari sumber data. Data sekunder berupa dokumen, literatur, artikel, jurnal, laporan serta website yang relevan. Pengumpulan data dengan instrumen pernyataan (kuisioner) menggunakan skala likert dengan gradasi sangat setuju, setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Dalam prosedur statistik seperti halnya regresi, mengharuskan penggunaan data berskala interval atau rasio, sehingga harus diubah kedalam bentuk data interval untuk memenuhi persyaratan dan prosedur (Sarwono, 2013). Transformasi data menggunakan Method of Successive Interval (MSI) dalam microsoft office excel.

Populasi dalam riset ini adalah SKPD lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh dengan jumlah 30 SKPD. Dalam riset ini semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel penelitian, peneliti mengambil sampel dengan menggunakan teknik total sampel atau sampel jenuh. Responden penelitian PPK-SKPD dan Bendahara Pengeluaran SKPD yang berjumlah 60 responden. Analisis karakteristik kualitatif LKPD bertujuan mendeskripsikan informasi laporan keuangan apakah telah memenuhi indikator kualitas laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami periode tahun 2011 hingga 2015. Peningkatan opini LKPD menunjukkan terjadinya kenaikan kualitas dan LKPD yang mendapatkan opini WTP mestinya menunjukkan laporan keuangan yang berkualitas. Analisis Pengaruh Kompetensi SDM, Lingkungan Pengendalian, Peran APIP dan Kualitas Revidi terhadap Kualitas LKPD. Analisis menggunakan regresi berganda melalui metode yang tersedia pada program Statistical Package for Sosial Science (SPSS) 22, model analisis diformulasikan sebagai berikut:

$$KLKPD = \beta_0 + \beta_1 KSDM + \beta_2 LP + \beta_3 PA + \beta_4 KR + e$$

Dimana :

KLKPD = Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

KSDM = Kompetensi sumber daya manusia

LP = Lingkungan pengendalian

PA = Peran APIP

KR = Kualitas revidi

$\beta_0$  = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$  = Koefisien regresi variabel bebas

e = Kesalahan Pengganggu

Uji validitas data dilakukan dengan membandingkan nilai Correlated Item-Total Correlation pada setiap butir pertanyaan dengan nilai r tabel product moment. Jika Correlated Item-Total Correlation r hitung > nilai r tabel dan nilainya positif atau setidaknya 0,3 maka butir pertanyaan pada setiap variabel penelitian dinyatakan valid (Kuncoro, 2015). Uji reliabilitas mengacu pada konsistensi dan stabilitas hasil pengukuran instrumen dengan kriteria nilai Cronbach Alpha > 0,60 (Sarwono, 2013). Uji Statistik F digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh signifikan secara bersama – sama

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**  
[redaksi@governance@gmail.com](mailto:redaksi@governance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

179

Indexed:



variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria yang digunakan dalam pengambilan keputusan adalah nilai F hitung lebih besar dari pada F tabel dan nilai signifikansi  $< 0,05$ . Uji statistik t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Kriteria yang digunakan dalam pengambilan keputusan adalah nilai t hitung lebih besar dari pada t tabel dan nilai signifikansi  $< 0,05$ .

Penentuan besarnya nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) bertujuan mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas (independen) menjelaskan variabel terikat (dependen). Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model, oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai R Square yang disesuaikan atau Adjusted R Square (Kuncoro, 2007).

Pengujian dilakukan agar diperoleh model yang bersifat Best Linier Unbias dan Estimator (BLUE) sehingga mempunyai daya prediksi yang tinggi (Gujarati, 2013). Asumsi klasik adalah beberapa persyaratan yang harus ditaati dalam prosedur regresi yang meliputi uji autokorelasi, multikolinieritas, normalitas dan heteroskedastisitas. Pada riset ini tidak dilakukan pengujian asumsi klasik autokorelasi, karena data yang digunakan merupakan data cross section, masalah autokorelasi sering terjadi pada data time series. Definisi operasional variabel dan indikator yang digunakan disajikan dalam tabel 1 sebagai berikut.

**Tabel 1: Operasionalisasi Variabel**

Variabel	Definisi	Indikator
Kompetensi Sumber Daya Manusia	Kemampuan baik dalam tingkatan individu, organisasi/kelembagaan, maupun sistem dlm melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif&efisien.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Latar belakang pendidikan yang sesuai.</li> <li>2. Sumber daya manusia mampu mengelola keuangan dan menyajikan laporan keuangan.</li> <li>3. Pelatihan &amp; pengembangan secara periodik.</li> </ol>
	Laporan akhir studi GTZ & USAID/CLEAN Indriasari & Nurhartyo (2008) Haryati (2016)	
Lingkungan Pengendalian	Kondisi lingkungan kerja SKPD lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh. PP No. 60/2008 COSO, 1992) Sudiarianti (2015)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penegakan integritas dan etika</li> <li>2. Standar kompetensi dan Struktur organisasi</li> <li>3. Kepemimpinan dan Pendelegasian wewenang</li> <li>4. Pengendalian intern</li> </ol>
Peran APIP	Peran Inspektorat selama melakukan reuiu laporan keuangan. (Permendagri No. 4/2008) Manaf et. al (2014)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tahap Perencanaan</li> <li>2. Tahap pelaksanaan</li> <li>3. Tahap pelaporan</li> </ol>
Kualitas Reuiu	Kondisi APIP yang mampu membandingkan pelaksanaan reuiu yang sebenarnya dengan yang seharusnya mengacu pada standar reuiu LKPD (PMK No. 8/PMK.09/2015)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Waktu pelaksanaan reuiu</li> <li>2. Kompetensi Pereuiu</li> <li>3. Tahapan Reuiu</li> <li>4. Kertas Kerja Reuiu</li> </ol>

	Widyarini (2015)	5. Pengungkapan masalah yang terjadi & langkah perbaikan
Kualitas Laporan Keuangan	Kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Sungai Penuh yang memiliki nilai informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. (PP No. 71/2010) Choirunisah (2008)	1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami

**PEMBAHASAN**

**Karakteristik Kualitatif LKPD**

**Relevan**

LKPD telah menggambarkan informasi yang memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi di masa lalu dan informasi tersebut dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. Realisasi belanja daerah yang tidak mencapai 100 %, belum dapat menciptakan stimulan perekonomian daerah secara optimal. Evaluasi, monitoring dan pengendalian terhadap APBD harus dilaksanakan secara berkelanjutan untuk memastikan pelaksanaan dan penyerapan anggaran telah sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan.

**Tabel 2: Karakteristik Kualitatif Relevan LKPD Kota Sungai Penuh Tahun 2011 - 2015**

Tahun	Karakteristik Kualitatif Relevan			
	Feedback value	Predictive value	Tepat waktu	Lengkap
2011 s.d 2015	Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi di ms lalu	Informasi membantu pengguna utk memprediksi masa yg akan datang bds hasil masa lalu & kejadian masa kini	Informasi disajikan tepat waktu	Informasi akuntansi keuangan pemerintah daerah disajikan dan diungkapkan dengan lengkap

Sumber : BPK, LKPD 2011-2015 (hasil analisis)

Penyampaian laporan keuangan kepada BPK setelah direviu oleh APIP telah memenuhi kriteria batas waktu yang ditetapkan, yaitu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. LKPD tahun 2011 hingga 2014 terdiri dari LRA, Neraca, LAK, dan CaLK. Tahun 2015 telah diterapkan SAP berbasis akrual, sehingga terdapat penambahan tiga jenis laporan yaitu LO, LPE dan LPSAL. Kondisi tersebut menggambarkan laporan keuangan Pemerintah Kota Sungai Penuh telah disajikan secara lengkap.

**Andal**

LKPD tahun 2011 menunjukkan adanya informasi yang tidak menggambarkan transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Peraturan perundang-undangan mengharuskan bahwa terhadap sisa kas (transaksi) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terlebih dahulu diproses melalui Majelis Pertimbangan TP-TGR. Hal ini telah



ditindaklanjuti melalui penyetoran sisa kas tersebut ke rekening kas daerah. LKPD tahun 2013 menunjukkan, adanya informasi laporan keuangan yang tidak dapat diverifikasi dan tidak dapat diuji. Pada tahun 2014 telah adanya kemajuan yang dibuktikan dengan perolehan opini WTP Dengan Paragraf Penjelasan.

LKPD tahun 2012, 2014 dan 2015 menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material. Posisi keuangan tanggal 31 Desember 2012, 2014 dan 2015, realisasi anggaran dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Laporan keuangan tahun 2012, 2014 dan 2015 menyajikan informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan. Informasi yang disajikan dapat diuji kebenarannya dan diarahkan pada kebutuhan umum serta tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. Hal tersebut menunjukkan laporan keuangan telah memenuhi karakteristik yang relevan, andal dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

**Tabel 3: Karakteristik Kualitatif Andal  
LKPD Kota Sungai Penuh Tahun 2011 - 2015**

Tahun	Karakteristik Kualitatif Andal		
	Penyajian Jujur	Dapat Diverifikasi	Netralitas
2011	Terdapat sisa kas bendahara pengeluaran pada salah satu SKPD yg tidak dpt dipertanggungjawabkan	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji kebenarannya.	Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
2013	Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan.	Adanya informasi laporan keuangan yang tidak dapat diverifikasi dan tidak dapat diuji kebenarannya.	Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
2012, 2014, & 2015	Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan.	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji kebenarannya.	Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

Sumber: BPK, LKPD 2011-2015 (hasil analisis)

### Dapat Dibandingkan

Perbandingan posisi keuangan dapat dilihat dari neraca keuangan daerah. Neraca tahun 2011 dan 2012 telah menggambarkan perbandingan keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana. Hal yang sama terjadi pada laporan keuangan Pemerintah Kota Sungai Penuh tahun 2013 hingga 2015, yang menunjukkan adanya perbandingan antara laporan keuangan tahun anggaran berjalan dengan tahun sebelumnya. Gambaran tersebut membuktikan laporan keuangan telah memenuhi karakteristik kualitatif dapat dibandingkan.

### Dapat Dipahami

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas pada pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan, sehingga tidak terjadi salah penafsiran dalam memahami isi laporan keuangan. Laporan keuangan Pemerintah Kota Sungai Penuh telah dapat dipahami oleh para pengguna, LKPD Kota Sungai Penuh tahun 2011 hingga 2015 dapat diterima BPK dengan baik dan tidak pernah dikembalikan BPK karena telah dapat dipahami.

**Analisis Pengaruh Kompetensi SDM, Lingkungan Pengendalian, Peran APIP dan Kualitas Reviu terhadap Kualitas LKPD**

**Profil Responden**

Peneliti menyebarkan 30 kuisisioner kepada Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dan 30 kuisisioner kepada Bendahara Pengeluaran SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh yang dilakukan pada bulan Maret hingga April 2017 dan keseluruhan kuisisioner dapat digunakan sebagai data dalam analisis lebih lanjut.

**Tabel 4: Profil Responden**

Responden	Jumlah	%
Usia		
< 35 tahun	15	25,00
35 - 40 tahun	34	56,67
41 - 45 tahun	6	10,00
> 45 tahun	5	8,33
Jenis Kelamin		
Pria	31	51,67
Wanita	29	48,33
Pelatihan		
> 3 kali	18	30,00
3 kali	13	21,67
2 kali	15	25,00
1 kali	9	15,00
Belum pernah	5	8,33
Masa Kerja		
< 5 tahun	3	5,00
5 - 10 tahun	43	71,67
11 - 15 tahun	11	16,67
. 15 tahun	4	6,67

Sumber: Hasil olahan data primer

**Statistik Deskriptif**

Rata – rata jumlah skor variabel kompetensi sumber daya manusia sebesar 34,77 standar deviasi 4,08 nilai maksimum 40 dan minimum 26 (tabel 5). Variabel lingkungan pengendalian memiliki rata – rata jumlah skor 23,70, standar deviasi 3,09 nilai maksimum 28 dan minimum 14. Rata – rata jumlah skor variabel peran APIP sebesar 27,62 standar deviasi 3,47 nilai maksimum 32 dan minimum 19. Variabel kualitas reviu memiliki rata – rata jumlah skor 26,42, standar deviasi 3,32 nilai maksimum 32 dan minimum 18, sedangkan kualitas laporan keuangan memiliki rata – rata sebesar 27,78 standar deviasi 2,97 nilai maksimum 32 dan minimum 22.

**Tabel 5: Nilai Maksimum, Minimum Rata-rata Jumlah Skor dan Standar Deviasi**

Variabel	N	Item	Teoritis		Aktual			
			Min	Max	Min	Max	Rata-rata	Std. Deviasi
Kompetensi SDM	60	10	10	40	26	40	34,77	4,08
Lingk.Pengendalian	60	7	7	28	14	28	23,70	3,09
Peran APIP	60	8	8	32	19	32	27,62	3,47
Kualitas Reviu	60	8	8	32	18	31	26,42	3,32
Kualitas LKPD	60	8	8	32	22	32	27,78	2,97

Sumber : Hasil olahan data primer

**Uji Validitas dan Reliabilitas Kompetensi SDM**

Hasil pengujian validitas variabel kompetensi SDM, lingkungan pengendalian, peran APIP, kualitas reviu dan kualitas LKPD menunjukkan semua item pernyataan memiliki r hitung > r tabel bernilai positif dan melebihi kriteria minimum r hitung ( $\geq 0,3$ ). Hasil pengujian ini menggambarkan semua item pernyataan telah mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Pengujian reliabilitas item pernyataan semua variabel menghasilkan nilai cronbach's alpha > 0,6, semua item pernyataan dapat diandalkan dan dinyatakan reliabel (tabel 6).

**Tabel 6: Uji Validitas dan Reliabilitas**

Variabel	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha
Kompetensi SDM	0,427 – 0,673	0.848
Lingk.Pengendalian	0.334 – 0,797	0.818
Peran APIP	0.437 – 0,793	0.830
Kualitas Reviu	0.311 – 0,569	0.745
Kualitas LKPD	0,314 – 0,628	0.756

Sumber: Hasil olahan data primer

**Analisis Regresi Berganda**

Analisis regresi berganda bertujuan menganalisis pengaruh variabel kompetensi sumber daya manusia, lingkungan pengendalian, peran aparat pengawasan intern pemerintah dan kualitas reviu terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil regresi berganda disajikan pada tabel 7 sebagai berikut.

**Tabel 7: Hasil Regresi Berganda Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	,581	,355		1,634	,108
	KSDM	,269	,091	,297	2,954	,005
	LP	,376	,114	,366	3,309	,002
	PA	,231	,103	,265	2,240	,029
	KR	,038	,113	,036	,331	,742

Sumber : Hasil olahan data (SPSS.22)

a. Dependent Variable: KLKPD

Dari hasil regresi berganda, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 0,581 + 0,269KSDM + 0,376LP + 0,231PA + 0,038KR + e \quad R^2 = 0,564$$

Se. = (0,355)    (0,091)    (0,114)    (0,103)    (0,113)    F = 17,774

t = (1,634)    (2,954)    (3,309)    (2,240)    (0,331)    df = 55

**Uji Statistik F**

Hasil uji statistik F diperoleh nilai F hitung lebih besar dari F tabel dan nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar  $0,000 < 0,05$ . Kompetensi sumber daya manusia, lingkungan pengendalian, peran aparat pengawasan intern pemerintah dan kualitas reviu secara bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD.

**Uji statistik t**

Hasil uji statistik t diperoleh nilai t hitung variabel kompetensi sumber daya manusia, lingkungan pengendalian dan peran aparat pengawas intern pemerintah menunjukkan angka yang lebih besar dari t tabel dan variabel kualitas reviu memiliki nilai t hitung lebih kecil dari t tabel. Dilihat dari nilai

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)  
[redaksi@governance@gmail.com](mailto:redaksi@governance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)



signifikansi yang dihasilkan, variabel kompetensi SDM, lingkungan pengendalian, peran APIP lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 dan kualitas revid lebih besar dari nilai signifikansi 0,05. Kompetensi SDM, lingkungan pengendalian dan peran APIP secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD. Kualitas revid tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD.

## Koefisien Determinasi

Nilai Adjusted  $R^2$  (koefisien determinasi yang disesuaikan) sebesar 0,532. Nilai ini menunjukkan 53,2 % variasi kualitas LKPD dapat dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel independen yaitu kompetensi SDM, lingkungan pengendalian, peran APIP dan kualitas revid, sisanya 46,8 % dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

## Uji Asumsi Klasik

Hasil pengujian normalitas Kolmogorov-Smirnov (K-S) diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,187 lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan data memiliki residual berdistribusi normal. Pengujian multikolinieritas menunjukkan nilai tolerance dan VIF memiliki angka yang lebih besar dari 0,1 dan kurang dari 10, model regresi bebas dari multikolinieritas. Pengujian heteroskedastisitas dengan uji Glesjer menunjukkan nilai signifikansi semua variabel independen lebih besar dari nilai signifikansi 0,05, model regresi bebas dari heteroskedastisitas.

## Pembahasan dan Implikasi Kebijakan

### Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Kualitas LKPD

Hasil uji statistik t diperoleh nilai t hitung lebih besar dari t tabel, sehingga kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD. Hal tersebut diperkuat dengan nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,005 lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05. Nilai koefisien regresi variabel kompetensi SDM sebesar 0,269 dan bernilai positif menggambarkan semakin tinggi kompetensi SDM, maka kualitas LKPD akan semakin baik. Hasil yang diperoleh sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD. Pengaruh yang signifikan ini disebabkan kompetensi SDM di subbagian perencanaan dan keuangan (PPK-SKPD) serta bendahara pengeluaran yang sudah mendukung, meskipun diakui masih sangat kurang dari sisi jumlah maupun kualifikasinya. Dari sisi jumlah, penyusun laporan keuangan yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi hanya sebesar 16,67 % dari 30 SKPD. Kelemahan yang ada diimbangi dengan mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah. Sebesar 51,67 % telah mengikuti 3 kali dan lebih pelatihan akuntansi/keuangan daerah dan hanya 8,33 % yang belum pernah mengikuti pelatihan

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Indriasih (2014), Afiah dan Rahmatika (2014) dan Sudiarianti (2014) yang mengungkapkan, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD, semakin meningkat kompetensi yang penyusun laporan keuangan maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin baik. Hasil yang diperoleh dari riset ini berbeda dengan penelitian Syarifudin (2014) yang menemukan, kompetensi SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD, meningkatnya variasi kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas LKPD. Penelitian Haryati (2016) menyimpulkan, kompetensi SDM berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas LKPD.

Masalah keagenan (keputusan merugikan) terjadi jika agen gagal memberikan kemampuannya, sehingga kemampuan agen yang berkompeten menjadi hal penting untuk mengatasi masalah keagenan (asymmetric information) (Eisenhardt, 1989). Asimetri Informasi disebabkan karena adanya distribusi informasi yang tidak sama antara prinsipal dan agen. Prinsipal semestinya memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam mengukur tingkat keberhasilan yang diperoleh dari tindakan yang dilakukan agen. Spencer (1993) dalam Syarifudin (2014) menyatakan, kompetensi merupakan suatu karakteristik yang mendasari kepribadian seseorang yang menyebabkan saling berkaitan dengan kriteria-keperilakuan efektif dan atau kinerja yang unggul dalam pekerjaan atau situasi tertentu.

### Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)  
[redaksi@governance@gmail.com](mailto:redaksi@governance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

185

Indexed:



Kompetensi SDM dan pegawai yang terlibat dalam proses penyusunan laporan keuangan harus ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan, karena semakin kompleksnya tugas dan tanggungjawab PPK-SKPD. Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang secara teknis dijelaskan dalam Peraturan Walikota, terjadi penggabungan sub bagian keuangan dengan sub bagian perencanaan evaluasi dan monitoring. Kondisi ini berdampak terhadap tugas, tanggungjawab dan beban kerja PPK-SKPD yang semakin meningkat. Alternatif yang dapat dilakukan adalah penempatan Jabatan Fungsional Perencana pada SKPD, dengan tugas dan fungsi yang fokus pada perencanaan, monitoring dan evaluasi.

## **Pengaruh Lingkungan Pengendalian terhadap Kualitas LKPD**

Hasil uji statistik t diperoleh nilai t hitung lebih besar dari t tabel. Dilihat dari nilai signifikansi yang dihasilkan, memiliki angka sebesar 0,002 dan lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05. Lingkungan pengendalian berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD. Nilai koefisien regresi variabel lingkungan pengendalian sebesar 0,376 dan bernilai positif dapat diartikan semakin baik lingkungan pengendalian, maka kualitas laporan keuangan pemerintah cenderung semakin meningkat. Hasil yang diperoleh ini sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan lingkungan pengendalian berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Sungai Penuh. Pengaruh yang signifikan ini disebabkan kondisi lingkungan pengendalian yang sudah mendukung. Sisa kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana disebutkan dalam LKPD tahun 2011 telah ditindaklanjuti dengan cara musyawarah atau mufakat yang difasilitasi oleh Majelis Pertimbangan TP-TGR, yaitu penggantian dan penyetoran ke rekening kas daerah yang dibebankan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang bersangkutan. Pimpinan SKPD telah menerapkan aturan mengenai perilaku dan standar etika pegawai serta selalu mengambil tindakan yang tegas atas pelanggaran kebijakan, prosedur, atau aturan perilaku. Penyelenggaraan unsur lingkungan pengendalian dengan baik akan meningkatkan suasana lingkungan yang nyaman dan kondusif dan akan menimbulkan kepedulian dan keikutsertaan seluruh pegawai sebagai representasi komitmen bersama dalam melaksanakan tupoksi masing-masing. Komitmen ini merupakan hal yang amat penting bagi terselenggaranya unsur-unsur SPIP lainnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Choirunisah (2008) yang menyimpulkan, organisasi tim berpengaruh positif dan signifikan terhadap relevansi informasi sebagai indikator kualitas informasi laporan keuangan. Penelitian Afiah dan Rahmatika (2014) dan Sudiarianti (2014) menemukan, SPIP merupakan faktor yang mempengaruhi kualitas LKPD, semakin tinggi penerapan SPIP, kualitas LKPD yang dihasilkan akan semakin baik. Indriasih (2014) membuktikan, efektivitas pengendalian intern pemerintah merupakan salah satu penyebab utama lemahnya kualitas pelaporan keuangan. Hasil riset ini memiliki perbedaan dengan penelitian Manaf et. al. (2014) yang menemukan, secara parsial pemahaman SPIP tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD.

Dalam konsep Agency Theory, manajemen sebagai agen semestinya mengutamakan kepentingan prinsipal, tetapi tidak tertutup kemungkinan manajemen hanya mementingkan kepentingannya sendiri untuk memaksimalkan utilitas. Masalah keagenan moral hazard merupakan kondisi lingkungan di mana agen melalaikan tanggungjawab atau bertindak untuk kepentingan sendiri yang bertentangan dengan kepentingan prinsipal/perusahaan (Eisenhardt 1989). Lingkungan pengendalian yang kuat akan menjadi pondasi bagi unsur lainnya agar dapat berjalan optimal (COSO, 2013). Menurut proporsinya, lingkungan pengendalian SPIP merupakan unsur yang berperan besar menentukan keberhasilan implementasi pengendalian intern, karena meliputi unsur yang sifatnya hard control dan soft control (Suharso, 2015).

Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan, pegawai ASN harus memiliki profesi dan manajemen ASN yang berdasarkan perbandingan antara kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang dimiliki sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Pelaksanaan analisis kebutuhan pegawai harus dilaksanakan secara menyeluruh dan ditindaklanjuti dengan penempatan

sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Seluruh pegawai harus mengetahui dan memahami aturan untuk berintegritas dan melaksanakan kegiatannya dengan sepenuh hati berdasarkan nilai etika yang berlaku tanpa terkecuali yang disertai dengan pemberian reward dan punishment.

## **Pengaruh Peran APIP terhadap Kualitas LKPD**

Hasil uji statistik t diperoleh nilai t hitung lebih besar dari t tabel. Peran APIP berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD. Hal tersebut diperkuat dengan nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,029 lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05. Nilai koefisien regresi variabel peran APIP sebesar 0,231 dan bernilai positif dapat diartikan semakin baik peran aparat pengawas intern pemerintah, maka kualitas LKPD akan semakin meningkat. Hasil yang diperoleh ini sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan peran APIP berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD.

Pengaruh yang signifikan ini disebabkan peran APIP yang sudah baik. APIP telah berperan dengan baik dalam proses penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analisis terhadap LKPD, sebagai dasar memadai untuk memberi keyakinan terbatas bahwa tidak terdapat modifikasi material dalam LKPD agar laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. yang didukung oleh 4 auditor muda, 8 auditor pertama, 1 P2UPD madya dan 4 P2UPD muda. Prosedur analitis merupakan tahapan yang sangat diutamakan untuk mengidentifikasi adanya hubungan antar akun dan kejadian yang tidak biasa serta tidak sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Hasil riset ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Setyowati (2016) yang membuktikan, peran internal audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Penelitian Haryati (2016) mengungkapkan, efektivitas auditor internal berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kualitas LKPD. Berbeda dengan riset Yohanes et. al. (2016) yang menemukan, penerapan konsep pemeriksaan secara komprehensif menyebabkan peran APIP tidak efektif dan menjadikan ruang lingkup pelaksanaan pemeriksaan reguler menjadi sangat luas dan kompleks serta tidak realistis dengan sumber daya yang tersedia.

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan, pengawasan (monitoring) merupakan salah satu metode untuk mengatasi konflik keagenan. Prosedur pengawasan dijalankan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan terhadap agen, secara internal dilakukan melalui peran efektif dewan komisaris, komite audit dan auditor internal. Sawyer et. al (2003) dalam Kurniawan (2015) menjelaskan, tujuan internal audit salah satunya menentukan apakah informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan. Fungsi audit internal sebagai pertahanan baris pertama terhadap kecurangan, berfokus terhadap berbagai kegiatan dan menjadi bagian integral tata kelola organisasi (Rezaee 2003).

Peran APIP dalam revidi LKPD harus dilakukan secara intensif, sebagaimana amanat Inpres No. 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara. Proses revidi laporan keuangan pemerintah daerah juga dapat diintegrasikan dengan proses perencanaan anggaran untuk mengatasi kesalahan prosedur dalam penempatan anggaran tertentu dalam akun atau rekening yang relevan mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Adanya wacana pemberian opini laporan keuangan oleh BPK akan disinergikan dengan kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), pelaksanaan pengawasan intern keuangan pada satuan kerja perangkat daerah diupayakan bersinergi dengan pengawasan kinerja SKPD.

## **Pengaruh Kualitas Reviu terhadap Kualitas LKPD**

Hasil uji statistik t diperoleh nilai t hitung hitung lebih kecil dari t tabel dan nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,742 lebih besar dari nilai signifikansi 0,05. Kualitas revidi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD. Nilai koefisien regresi variabel kualitas revidi sebesar 0,038 dan bernilai positif dapat diartikan semakin baik kualitas revidi laporan keuangan, maka kualitas laporan keuangan cenderung semakin meningkat. Hasil yang diperoleh ini sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan kualitas revidi berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD. Tidak signifikannya pengaruh

*Penerbit:*

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**  
[redaksi@governance@gmail.com](mailto:redaksi@governance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

187

Indexed:



kualitas rewiu kemungkinan disebabkan oleh masih kurangnya pemahaman PPK-SKPD dan bendahara pengeluaran SKPD terhadap kualitas rewiu sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.09/ 2015. \

Hasil penelitian ini sejalan dengan Penelitian Gau (2016) yang membuktikan, rewiu laporan keuangan yang berkualitas dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, semakin baik kualitas rewiu, semakin rendah jumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga dapat meningkatkan kualitas LKPD. Bauwhede (2001) menyebutkan, kualitas audit dan regulasi pelaporan merupakan faktor potensial yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan Wandawa (2013) yang menemukan, perencanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan tidak berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan, sedangkan pelaksanaan pemeriksaan, supervisi dan rewiu berpengaruh terhadap kualitas audit LKPD.

Jensen dan Meckling (1976) dalam agency theory menyatakan, pelaksanaan pengawasan yang tidak efektif, manajemen kemungkinan akan melakukan penyimpangan yang dapat merugikan prinsipal. Copley dan Doucet (1993) dalam Sarmado (2013) menjelaskan, kualitas audit ditentukan oleh kesesuaian dengan standar profesional pelaporan dan pekerjaan lapangan. Watkins et. al (2004) menyatakan, kualitas audit menggambarkan kompetensi dan independensi aktual auditor, kekuatan pemantauan akan menghasilkan informasi yang berkualitas yang diukur dari seberapa baik informasi mencerminkan kondisi sesungguhnya. Kualitas rewiu mestinya menunjukkan kemampuan APIP untuk menemukan dan melaporkan pelanggaran dalam sistem akuntansi pemerintah berdasarkan standar yang berlaku.

Konsep standar rewiu yang ditetapkan dalam PMK No. 8/PMK.09/2015 selain bertujuan meningkatkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, juga bertujuan membantu kepala daerah menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan rewiu LKPD Kota Sungai Penuh belum dilakukan secara periodik sepanjang pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan, hingga tahun 2016 rewiu masih menunggu setelah laporan keuangan selesai disusun. Kedepan rewiu mestinya dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan anggaran dan tidak menunggu laporan keuangan selesai disusun. Namun perlu diingat, rewiu tidak sedalam prosedur audit dan hanya dapat memberikan keyakinan terbatas (limited assurance).

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Laporan keuangan Pemerintah Kota Sungai Penuh tahun 2012, 2014 dan 2015 mendapatkan opini WTP, semua karakteristik kualitatif telah terpenuhi. Pencapaian opini WTP menggambarkan laporan keuangan yang memiliki kualitas yang baik. LKPD Tahun 2011 dan 2013 opini WDP dan menunjukkan adanya kelemahan dari sisi keandalan laporan keuangan. informasi tidak menggambarkan transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan dan terdapat informasi yang tidak dapat diverifikasi (verifiability).
2. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan koefisien regresi bernilai positif yang menunjukkan semakin baik kompetensi SDM, lingkungan pengendalian, peran APIP dan kualitas rewiu, maka kualitas LKPD cenderung semakin meningkat. Uji statistik F menggambarkan kompetensi SDM, lingkungan pengendalian, peran APIP dan kualitas rewiu secara bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD. Hasil uji statistik t menunjukkan secara parsial kualitas rewiu tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD.

## REFERENSI

Afiah, N. Rahmatika. D. N. 2014. Factors Influencing The Quality of Financial Reporting and Its Implications on Good Government Governance (Research On Local Government Indonesia). International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 5, Issue 1 (Dec) ISSN : 2289-1552.

*Penerbit:*

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**  
[redaksi@governance@gmail.com](mailto:redaksi@governance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

188

Indexed:



- Arnes, D. 2008. Menunggu Peran Inspektorat dalam Reviu Laporan Keuangan Daerah. *Majalah Pemeriksaan BPK RI No 116/Edisi Khusus*.
- Bauwhede. H. V. 2001. What Factors Influence Financial Statement Quality. A Framework and Some Empirical Evidence. Departement of Applied Economocs, Naamsestraat LEUVEN.
- Choirunisah, F. 2008. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan yang Dihasilkan Sistem Akuntansi Instansi (Studi pada Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Malang). *Jurnal UGM*.
- Cooper, D. R, C. W. Emory. 1996. *Metode Penelitian Bisnis*. Jilid 1 Edisi ke lima. Jakarta: Erlangga.
- DeAngelo, L. E 1981. Auditor Size and Audit Quality. *Journal of Accounting and Economics* : 183-199.
- Gau. A. I. 2016. Analisis Kualitas Reviu atas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi pada Inspektorat Kabupaten Klaten). Tesis. Magister Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*”, Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Edisi Keempat.
- Gujarati, D.N. Porter D.C. 2013. *Dasar - Dasar Ekonometrika*. Salemba Empat. Jakarta. Edisi Kelima. ISBN : 978-979-061-064-4.
- Hadiprajitno. P.B. 2013. Struktur Kepemilikan, Mekanisme Tata Kelola Perusahaan, dan Biaya Keagenan di Indonesia (Studi Empirik pada Perusahaan di Bursa Efek Indonesia). Universitas Diponegoro. *Jurnal Akuntansi & Auditing Volume 9/No. 2/MEI 2013* : 97 – 127.
- Haryati. T. 2016. Antecedent Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Indonesia Treasury Review. Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Volume 1 Nomor 3 Tahun 2016 ISSN No.2527-2721*.
- Indriasari. D, E. Nurhatyo .2008. Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang Dan Kabupaten Ogan Ilir). *Jurnal. Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang-Universitas Gadjah Mada*.
- Indriasih, D. 2014. The Effect of Government Apparatus Competence and the Effectiveness of Government Internal Control Toward the Quality of Financial Reporting in Local Government. Accounting Doctoral Program Faculty of Economic and Business. Padjadjaran University-Indonesia. *Research Journal of Finance and Accounting. ISSN : 2222-1697 (paper) ISSN 2222-2847 vol.5, no.20, 2014*.
- Jensen, M.C. and W.H. Meckling. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure, *Journal of Financial Economics*, 3 : 305–360.
- Kuncoro, M. 2007. *Metode Kuantitatif (Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi)*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta. Edisi Ketiga. ISBN : 979-8170-71-7.
- Kuncoro, M. 2013. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi (Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis)*. Yogyakarta. Edisi Keempat.
- Kurniawan, A. 2015. *Audit Internal Nilai Tambah bagi Organisasi*. BPFY-Yogyakarta. ISBN : 979-503-584-3. Edisi Kedua.
- Manaf, I. A. Arfan. M. Darwanis. 2014. Pengaruh Pemahaman Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Proses Reviu LKPD oleh Inspektorat dan Implikasinya terhadap Kualitas LKPD pada Inspektorat Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi ISSN : 2302-0164*.
- Mardiasmo, 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol. 2, No. 1, Mei. 2006*.
- Merzy, U. 2009. Peranan Reviu Dalam Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan”, Auditoria, Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan, Volume III, Edisi 14 September-Oktober.
- Prasetyo. B. Jannah. L. M. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif : Teori dan Aplikasi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. ISBN. 979.469.008.03.

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**  
[redaksi@governance@gmail.com](mailto:redaksi@governance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

189

Indexed:



- Rahmat, S. 2010. Analisis Peran Inspektorat Jenderal Sebagai Aparat Pengawasan Internal Kementerian/Lembaga dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (studi pada kementerian keuangan) Tesis Magister Akuntansi Universitas Indonesia.
- Rezaee. 2003. High Quality Financial Reporting. The Six-Legged. Strategic Finance. February 2003.
- Sarwono, J. 2013. Strategi Melakukan Riset (Kuantitatif, Kualitatif, Gabungan). Yogyakarta. Andi Offset. ISBN : 978-979-29-2124-3.
- Setyowati. L. Wikan. I. Ririh. D. P. 2016. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang. Jurnal Kinerja, Volume 20, no.2, th. 2016: hal. 179-191.
- Situmorang. S.H. Dalimunthe. D.M.J. Muda. I. Lufti. M. Syahyunan. 2008. Analisis Data Penelitian (Menggunakan Program SPSS). Universitas Sumatera Utara.
- Sudiarianti, N. 2015. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Penerapan SPIP Dan Standar Akuntansi Pemerintah Serta Implikasinya Pada Kualitas LKPD. Tesis Pasca Sarjana Universitas Udayana.
- Suharso. 2015 . Mengoptimalkan Penerapan Pengendalian Intern di Kementerian Keuangan Melalui Pemantauan. Auditoria. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Volume VII No.41 Edisi Januari – Maret 2015 ISSN : 1411-9455
- Supriyanto, 2008. Peran Institusi Pengawasan dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Tesis Program Magister Studi Pembangunan Institut Teknologi Bandung.
- Syarifudin. A. 2014. Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Studi Empiris pada Pemkab Kebumen). Jurnal Fokus Bisnis, Volume 14, No 02, bulan Desember 2014
- Tandiontong, M. 2016. Kualitas Audit dan Pengukurannya. Alfabeta. Bandung. ISBN : 978-602-289-203-8
- Tanjung, H. A. 2014. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua Untuk SKPD. Alfabeta Bandung. ISBN : 978-602-289-139-0
- Tan, S. 2010. Perencanaan Pembangunan (Teori dan Implementasi pada Pembangunan Daerah). Fakultas Ekonomi Universitas Jambi. ISBN : 978-602-98081-0-0.
- Wandawa, P. S. 2013. Kualitas Audit Sektor Publik ( Studi pada Kantor Perwakilan BPK RI). Tesis Fakultas Ekonomi Program Magister Akuntansi Universitas Sebelas Maret.
- Widyarini, K. 2015. Pengaruh Prosedur Reviu, Latar Belakang Pendidikan, Tekanan Waktu, dan Anggaran Dana Reviu pada Kualitas Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi empiris pada inspektorat daerah di Provinsi Bali). Tesis Pasca Sarjana Universitas Udayana.
- Wynne, A. Fred. M. 2016. Government Financial Reporting - Good Practices from sub-Saharan Africa. International Journal on Governmental Financial Management - Vol. XVI, No 1.
- Yohanes, E., Adri. P., Anwar. A. 2016. Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bulungan. Journal Administrative Reform 65-78 ISSN : 2338-7637.
- Yuliani, S. Nadirsyah. Bakar. U. 2010. Pengaruh pemahaman akuntansi, Pemanfaatan Sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah. Program Magister Sains Akuntansi PPS Unsyiah. Jurnal Telaah & Riset Akuntansi.
- Sekretariat Negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Sekretariat Negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Sekretariat Negara. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.
- Sekretariat Negara. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

# GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 3 Maret 2026

- Sekretariat Negara. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Sekretariat Negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Sekretariat Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Sekretariat Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Sekretariat Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Sekretariat Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Kementerian Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Kementerian Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER-220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya.
- Kementerian Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.
- Kementerian Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014
- Kementerian Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah Tahun 2015
- Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- Pemerintah Kota Sungai Penuh. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Pemerintah Kota Sungai Penuh. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 45 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Sungai Penuh.
- Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia. 2013. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI).
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2015. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2015.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2016. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2016.
- Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jambi. 2016. Resume Hasil Pemeriksaaan Tahun 2011- 2015.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2013. Warta Pengawasan 2013. Transformasi Pengawasan Nasional. BPKP Edisi Khusus HUT ke 30-ISSN : 0854-0519

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**  
[redaksi@governance@gmail.com](mailto:redaksi@governance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

191

Indexed:

